



## Ada NYIA, Minta Moratorium Dicabut

**Berakhir 31 Desember 2018, belum Ada Perwal Baru**

**JOGIA** - Peraturan Wali Kota Jogja nomor 100 tahun 2017 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Jogja akan berakhir pada 31 Desember 2018. Belum ada tanda penghentian sementara atau moratorium pembangunan hotel akan diperpanjang atau dicabut. Kalangan perhotelan sekarang justru berharap Wali Kota Jogja mencabut.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ Istdjab M. Danunegoro mengaku juga sudah mengkonfirmasi ke Wali Kota Jogja terkait moratorium akan diperpanjang atau tidak. Tapi belum ada respon.

"Kami juga sedang menunggu tentang masalah ini (moratorium). Kami sebenarnya setuju-setuju saja jika moratorium berakhir," ujarnya.

Tapi Istdjab menambahkan sempat mendapat informasi moratorium akan tetap berlaku. Tapi pada hotel bintang empat dan lima. Jika itu terealisasi, Istdjab menilai nantinya hotel bintang tiga kebawah bisa berkembang. Itu karena hotel bintang empat dan lima lebih stabil dan mendapat dukungan untuk pengembangan usahanya. "Karena saat ini banyak hotel dengan bintang empat kebawah yang tergecet. Karena kehadiran hotel bintang empat dan lima," katanya.

Alasan lainnya, mantan GM Grand Quality Hotel itu karena akan beroperasinya bandara

baru di Kulonprogo. Dengan adanya bandara internasional itu akan lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara yang akan datang.

"Dengan adanya NYIA, dipastikan penerbangan ke Jogja akan lebih banyak. Mungkin banyak wisatawan yang berasal dari Hongkong, Korea, Jepang dan negara ASEAN yang membutuhkan kamar hotel untuk menginap," paparnya.

Terpisah Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPM) Kota Jogja Setiono menjelaskan sejak moratorium diberlakukan pada 1 Januari 2014 silam ada 104 izin yang masuk sebelum moratorium diberlakukan. Dari jumlah tersebut sudah dikeluarkan izin membangun bangunan (IMB) sebanyak 88 izin. Sisanya, jelas dia belum dilayani karena persyaratannya belum lengkap.

"Dari jumlah total pengajuan yang masuk ada yang dibatalkan dan ada yang tidak dibangun," jelasnya.

Ketika dimintai tanggapannya, Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi menolak untuk menjawab terkait moratorium hotel. Menurut HP sekarang belum saatnya membicarakan moratorium. "Nanti saja ya, sedang ada acara," ujar HP ketika dikonfirmasi minggu lalu. (cr5/prs/zi)

<p>Instansi</p> <p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. ....</p> <p>4. ....</p> <p>5. ....</p>	<p>erita</p> <p>titif</p> <p>il</p> <p>il</p>
--	---

<p><input type="checkbox"/> Segera</p> <p><input type="checkbox"/> Biasa</p>	<p><b>Tindak Lanjut</b></p> <p><input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi</p> <p><input type="checkbox"/> Untuk Diketahui</p> <p><input type="checkbox"/> Jumpa Pers</p>
--	---

Yogyakarta, .....  
Plt. Kepala



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005